



JURNAL DEWAN PERS

VOL. 21 JUNI 2020

PERS DAN DINAMIKA POLITIK INDONESIA



**PERS
■ DAN ■
DINAMIKA
POLITIK
INDONESIA**



JURNAL DEWAN PERS

Edisi 21

PENGARAH

Mohammad NUH
Hendry Ch Bangun

PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB

Ahmad Djauhar

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Jamalul Insan,
Asep Setiawan,
Arif Zulkifli

PENYUNTING

Winarto

SEKRETARIAT

Syaefudin
Deritawati
Sri Lestari
Watini

DESAIN & TATA LETAK

Sudarwanto BR
(IG: lwihan Gimbal)

© 2019 DEWAN PERS
ISSN 2085-6199

SEKRETARIAT DEWAN PERS

Gedung Dewan Pers, Lt. 7-8
Jl. Kebon Sirih No. 32-34
Jakarta Pusat
Telp. (021) 3504874,
3504875, 350487477
Faks. (021) 3452030

Website

www.dewanpers.or.id
www.presscouncil.or.id

E-mail

sekretariat@dewanpers.or.id

Twitter

@dewanpers

DAFTAR ISI

(hal. 04)

KATA PENGANTAR PERS DAN DINAMIKA POLITIK DI INDONESIA

Oleh: **MOHAMMAD NUH**

(hal. 06)

EDITORIAL KELINDAN PERS DAN POLITIK

Oleh: **AHMAD DJAUHAR**

UTAMA

(hal. 08)

INDEPENDENSI RUANG REDAKSI (CATATAN TAYANGAN BERITA PILPRES DI TV)

Oleh: **JAMALUL INSAN**

(hal. 17)

INDEPENDENSI REDAKSI: MEMBANDINGKAN KASUS DI INGGRIS, AS, DAN INDONESIA

Oleh: **ASEP SETIAWAN**

(hal. 26)

PERS PARTISAN, BOLEHKAH?

Oleh: **ATMAKUSUMAH**

(hal. 33)

PERS DAN PEMILU SERENTAK DI BALI: HILANGNYA AGENDA LOKAL DAN DAYA KRITIS PERS

Oleh: **Dr. NI MADE RAS AMANDA GELGEL**

(hal. 45)

DEMOKRASI, MEDIA, DAN TEKNOLOGI

Oleh: **IMAM WAHYUDI**

(hal. 60)

RESENSI BUKU JURNALISME INVESTIGATIF DI ERA DIGITAL

Oleh: **WINARTO**

(hal. 68)

RISET KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAPPERS PERLU DIKAJI

Oleh: **WINARTO**

PERS DAN PEMILU SERENTAK DI BALI: HILANGNYA AGENDA LOKAL DAN DAYA KRITIS PERS

Oleh: **Dr. NI MADE RAS AMANDA GELGEL***)



ABSTRAK

Pers adalah bagian integral dari demokrasi suatu negara. Oleh karena itu, pada pesta demokrasi pers diharapkan menjaga netralitas dan berperan penuh. Pemilu serentak 2019 merupakan ujian bagi dunia pers, baik pers nasional maupun lokal, apakah mampu menjaga idealismenya. Pemilu yang serentak berdampak pada priming media yang mengedepankan isu-isu nasional. Hal ini terjadi pada pemberitaan pers di Bali pada saat pemilu serentak 2019. Dari 50 sampel berita di media lokal online yang dikaji, diketahui isu/agenda yang mendapat porsi pemberitaan sebagian besar adalah isu nasional yakni kampanye pasangan capres-cawapres. Isu-isu lokal dapat dikatakan menghilang karena kuantitas dan sorotannya yang sangat minim. Dampaknya adalah hilangnya wacana atau perbincangan (agenda publik) di masyarakat lokal

mengenai permasalahan-permasalahan seputar mereka. Hal ini tentu mengancam aura demokrasi di tingkat lokal, yakni kurangnya informasi dan referensi masyarakat mengenai politik lokal. Karena kurang mendapat ruang di media arus utama, pilihan para peserta pemilu tingkat lokal kemudian beralih pada media lokal lain yang masih bersedia memberikan tempat untuk berwacana. Media media tersebut umumnya adalah media yang belum terverifikasi sebagai perusahaan pers sesuai standar yang ditetapkan Dewan Pers. Mereka cenderung hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi. Dampaknya adalah hilangnya objektivitas dan daya kritis media tersebut dalam menyajikan berita terkait pemilu.

Kata kunci: agenda media, bali, pers lokal, pemilu, isu lokal

PENDAHULUAN

Keberadaan pers adalah sebagai penyeimbang berjalannya tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa. Pers diharapkan menjaga objektivitas dan berpartisipasi pada saat demokrasi suatu bangsa diuji yakni pada Pemilu. Pemilu serentak pada 2019 merupakan ujian bagi dunia pers apakah mampu menjaga idealismenya, baik pers nasional maupun pers lokal. Namun pemilu yang serentak disinyalir menyebabkan perhatian pers tersentralisasi pada isu-isu nasional. Hal ini akan menyebabkan hilangnya agenda-agenda di tingkat lokal serta menumpulkan daya kritis pers. Fenomena ini yang akan dikaji dalam tulisan ini.

Pesta demokrasi telah usai pada setahun yang lalu tepatnya 17 April 2019. Pemilu serentak akan memengaruhi komitmen penguatan partai politik dalam koalisi permanen untuk memperkuat basis kekuatan mereka di lembaga-lembaga ne-

gara yang tinggi sehingga pemilu serentak diharapkan dapat memfasilitasi pembenahan sistem presidensial di Indonesia¹. Sebanyak 190 juta orang terdaftar sebagai pemilih yang telah memilih seorang Presiden dan Wakil Presiden, 575 anggota DPR RI, 136 Anggota DPD, 2207 anggota DPRD Provinsi dan 17.610 anggota DPRD Kota/Kabupaten. Pesta demokrasi melibatkan 15 Partai Nasional dan 4 partai lokal di NAD.

Angka besar ini menjadi bagian utama perhelatan akbar yang telah dimulai pada tahun 2018. Media massa berlomba-lomba mengangkat pesta ini di dalam ruang-ruang pemberitaan dan ragam bentuk karya jurnalistik lainnya. Pemilu serentak 2019 mendapat sorotan karena selain menjadi tolak ukur demokrasi di Indonesia, pesta ini tercatat menggunakan lebih dari Rp25 Triliun uang rakyat untuk pelaksanaannya

Data Kementerian Keuangan RI, pesta ini lebih mahal dibandingkan pada Pemilu 2014. Direktorat Jendral Anggaran mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pemilu sebesar Rp25,59 Triliun, naik dibandingkan pada Pemilu 2014 yang menganggarkan Rp15,62 triliun. Anggaran untuk Pengawasan melalui Bawaslu pun meningkat menjadi 4,86 Triliun dari Rp3,67 Triliun pada tahun 2014. Angka ini walau naik dianggap lebih efektif karena penyelenggaraan pemilihan calon legislatif dan Calon Presiden dilakukan bersamaan². Pesta demokrasi ini dianggap akan mampu menggerakkan perekonomian Indonesia. Kampanye yang panjang akan membuat peserta pemilu mengeluarkan biaya untuk iklan, ongkos atribut kampanye, konsultan politik, hingga berhubungan dengan media.

Anggaran yang besar dan proses demokrasi ini pun dinilai memiliki kerawanan. Indeks Kera-

1. Ratnia Solihah, 2018. Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan vol. 3, No. 1, 2018 73-88 DOI: 10.14710/jiip.v2i1.3234

2. Kemenkeu.2019. 'Memilih Masa Depan Indonesia', MEDIAKEUANGAN: Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal, Vol XIV/No. 139/April 2019

wanan Pemilu yang dikeluarkan Banwaslu mencatat hasil Indeks Kerawanan Pemilu untuk pemilihan umum tahun 2019 (IKP 2019) pada tingkat provinsi menunjukkan bahwa semua daerah menduduki peringkat kerawanan sedang³. Beberapa dimensi yang harus diwaspadai di antaranya dimensi relasi kuasa di tingkat lokal, kampanye, partisipasi pemilih dan publik. Relasi lokal mengkhawatirkan meningkatnya pengaruh tokoh/kelompok dominan di tingkat kabupaten/kota, adanya mobilisasi dengan menggunakan politik uang dan adanya tokoh/kelompok bisnis dominan di tingkat kabupaten/kota.

Indeks Kerawanan Pemilu menggunakan media massa sebagai indikator. Hampir di seluruh dimensi menyertakan pemberitaan di media massa menjadi tolak ukur. Contohnya pada subdimensi proses pencalonan (132-136), isi pemberitaan menjadi tolak ukur yaitu, apakah ada atau tidak pemberitaan di media massa tentang sengketa pencalonan DPRD Kab/Kota (0,46), pemberitaan mengenai identifikasi hubungan kekerabatan antara peserta dan penyelenggara Pemilu, pemberitaan tentang praktik mahar politik. Bahkan subdimensi partisipasi publik hanya menggunakan indikator dari pemberitaan di media massa yakni, apakah ada pemberitaan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, adanya hambatan media massa terhadap akses proses tahapan pemilu (165).

Hal ini membuktikan bahwa media massa dinilai memiliki peran cukup besar atas keberhasilan pemilu pada khususnya dan demokrasi di Indonesia pada umumnya. Peran media massa adalah hal hakiki dalam perhelatan terakbar ini. Pers diharapkan mampu menyediakan ruang publik sebagai wadah aspirasi maupun penyaluran suara/agenda publik untuk menjadi bah-

an pertimbangan pada saat kampanye jelang pemilu⁴. Wolfgang Merkel (2004) menjelaskan peran pers dalam *embedded democracy*, di mana prinsip-prinsip demokrasi ada dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pers dalam *embedded* demokrasi berada di posisi dalam mempersiapkan prasyarat hak politik. Pers menjadi mekanisme untuk masyarakat mengawasi dan memberikan *reward-punishment* bagi pemerintah dalam keseharian bukan hanya pada saat pesta demokrasi 5 tahun sekali. Demokratisasi di Indonesia hingga di tingkat lokal. Oleh karena itu pers di tingkat lokal juga tetap menjalankan salah satu fungsi persnya yakni *surveillance* atau pengawasan. Pers lokal diharapkan menjalankan fungsinya sebagai pengawas atau 'anjing penjaga'. Pers bertugas untuk memastikan pemerintahan dan sistemnya berjalan sebagaimana mestinya dan tidak merugikan masyarakat (Schechter, 2007⁵, Ishwara 2008)⁶. Demokratisasi yang telah berbasis hingga tingkat lokal membutuhkan pers di tingkat lokal untuk bekerja bersama memastikan demokrasi Indonesia berjalan pada jalurnya.

Media lokal dapat berperan dalam terwujudnya proses demokrasi di Indonesia. Namun eksistensi media lokal sebagai subsistem dalam politik lokal membutuhkan profesionalisme dan idealisme. Tanpa keduanya, tidak akan mudah untuk media tetap bertahan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Sebagai institusi bisnis, media lokal harus meningkatkan kualitas manajemen mereka untuk mendukung seluruh perusahaan dan kesejahteraan pekerjanya (Yusuf, 2011)⁷.

Bali pada pemilu serentak 2019 memiliki tingkat partisipasi di atas target nasional. KPU Bali mencatat tingkat partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019 mencapai 81,25 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional yakni 77,5 persen. Bali se-

3. Bawaslu (Badan pengawas Pemilihan Umum). 2019. IKP 2019 Indeks Kerawanan Pemilu. Bawaslu : Jakarta

4. Wolfgang Merkel. 2004. Embedded and Defective Democracies. *Democratization*. Vol 11, No 5.

5. Danny Schechter. 2007. *Matinya Media Perjuangan, Menyelamatkan Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

6. Luwi Ishwara. 2008. *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Kompas

7. Yusuf, Iwan Awaludin. 2011. Media Lokal dalam konstelasi komunikasi politik di Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 14, No.3 <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10930>

lalu menjadi satu dari sekian banyak provinsi di Indonesia dengan tingkat pemilih yang tinggi.

Oleh karena itu menarik ditelaah apakah tingginya partisipasi pemilih di Bali dan dinamika politik lokal di Bali dipengaruhi oleh kinerja media massa lokal di Bali? Bagaimana peran media massa khususnya media lokal di Bali dalam pemilu serentak? Apakah media lokal di Bali telah melakukan perannya dalam memberikan referensi dan informasi yang dibutuhkan publik dan melakukan pengawasan?

PERS LOKAL DI BALI, ISU DAN PEMILU

Kajian ini akan menggunakan dasar analisis isi atas lima media online terbesar dan terkuat di Bali selama masa kampanye 23 September hingga 13 April 2019. Kelima media *online* yang dijadikan objek penelitian adalah (1) *balipost.com*, bagian dari kelompok media terbesar dan terkuat di Bali yakni Kelompok Media *Balipost*, (2) *beritabali.com*, satu-satunya media lokal yang hanya berbasis pada media *online* dan menjadi media *online* pertama di Bali, (3) *nusabali.com*, salah satu media lokal yang berkonvergensi dengan media cetak yang merupakan salah satu media dengan oplah tertinggi di Bali, (4) *bali.tribunnews.com* sebagai media *online* dengan tingkat pengunjung terbanyak di Bali dan terbanyak ketiga di Indonesia untuk website (Alexa, 2020), (5) *radarbali.jawapos.com* sebagai media dengan jumlah kunjungan yang tinggi dan bagian dari jejaring media nasional terbesar.

Dari masing-masing media tersebut diperoleh 10 sampel berdasarkan tingkat kunjungan terting-

gi. Maka diperoleh total 50 sampel berita selama masa kampanye pemilu serentak 2019.

Dari 50 berita yang dijadikan sampel obyek penelitian, diketahui beberapa isu yang menjadi agenda utama di pemberitaan kelima media *online* tersebut. Isu tersebut adalah Kampanye Pilpres, Gaya/bentuk berkampanye, Pelanggaran Kampanye, hingga persiapan yang dilakukan penyelenggara. *Agenda-setting theory* yang dirumuskan oleh McCombs and Shaw pada 1972, menjelaskan relasi antara penekanan media massa pada isu tertentu dan arti penting yang dinisbahkan audiensi kepada isu tersebut. Isu yang ditekankan media ini ditekankan untuk mendapat perhatian lebih dari masyarakat umum. Dari identifikasi isu di atas, porsi pemberitaan lebih banyak bicara mengenai kampanye yang dilakukan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Baik Pasangan Joko Widodo – Ma'aruf Amin maupun Pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Dari 50 sampel berita, 23 berita mengangkat isu mengenai kampanye kedua pasangan kampanye. Ini menunjukkan bahwa isu mengenai kampanye Pilpres mendapat porsi dan penekanan yang lebih besar. Berikut beberapa contoh berita mengenai kampanye Pilpres. Berita dari *balipost.com* dengan judul "Megawati Minta Kader PDIP Menangkan Pileg dan Jokowi-Ma'ruf"⁸, "Di Bali Prabowo Janjikan Rekrut Pejabat Anti Korupsi"⁹. Berita dari *bali.tribunnews.com* dengan judul "Kampanye di Kompyang Sujana, Prabowo Puji Kepahlawanan Masyarakat Bali"¹⁰, "Berkampanye di Bali, Ini yang Dirasakan Prabowo"¹¹. *NusaBali.com* dengan berita berjudul "Prabowo hari ini, Jokowi Baru Akan Goyang Bali 6 April"¹² dan "Kampanye Terbuka Jokowi Di Bali Dievaluasi"¹³. *Beritabali.com* dengan berita "Kampanye di Denpasar, Ini Pesan Pra-

8. <http://www.balipost.com/news/2018/09/01/54395/Megawati-Minta-Kader-PDIP-Menangkan...html>

9. <http://www.balipost.com/news/2019/03/26/71612/Di-Bali,Prabowo-Janjikan-Rekrut...html>

10. <https://bali.tribunnews.com/2019/03/26/kampanye-di-kompyang-sujana-prabowo-puji-kepahlawanan-masyarakat-bali>

11. <https://bali-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/bali.tribunnews.com/amp/2019/03/26/berkampanye-di-bali-ini-yang-dirasakan-prabowo>

12. <https://www.nusabali.com/berita/49366/prabowo-hari-ini-jokowi-baru-akan-goyang-bali-6-april>

13. <https://www.nusabali.com/berita/49795/kampanye-Terbuka-Jokowi-Di-Bali-Dievaluasi>



Gambar 1. Berita 5 Media Online terbesar di Bali

bowo Untuk Semeton Bali¹⁴. *Radarbali.jawapos.com* dengan berita “Wooww...Kampanye di Bali, Capres Prabowo Janji Turunkan Semua Harga¹⁵ dan “1.000 Penari Siap Warnai Kampanye Akbar Jokowi- Ma’ruf Amin¹⁶.”

Contoh berita dengan di luar kampanye pilpres adalah dengan penekanan pada (1) Bentuk Ragam Kampanye yang ditemui pada berita antara lain di *balipost.com* “Ganti, Gaya Kampanye Model Kolonial¹⁷ dan *bali.tribunnews.com* dengan berita “Bawa Badut ke Kampanye Terbuka, PKS Ingin Politik Bergembira¹⁸; (2) Pelanggaran Kampanye dapat ditemui pada berita antara lain dari *bali.tribunnews.com* dengan berita “Soal Dugaan Pelanggaran Kampanye Koster, Begini Respon

Bawaslu¹⁹ dan *radarbali.jawapos.com* dengan berita “Final! Kampanye di Acara Polda Bali, Kasus Koster Masuk Penyelidikan²⁰; (3) Kampanye di luar kampanye pilpres yang ditemui pada berita *nusabali.com* dengan judul “Bagi-bagi Bakso dan Es Cincau, Kampanye Kreatif Ala Made Mangku Pastika²¹; (4) Kinerja Penyelenggara, pada berita di *nusabali.com* yakni “KPU Bali ‘warning’ iklan kampanye berkonten SARA²² dan dari *beritabali.com* dengan berita “Bawaslu Tabanan Kewalahan Tertibkan Atribut Partai di Pohon Perindang²³.”

Dari judul dan isi berita di atas diketahui bahwa media lokal di Bali lebih banyak memberitakan isu nasional yakni kampanye pilpres. Dari 50 sampel berita yang dikumpulkan hampir tidak

14. <https://www.news.beritabali.com/read/2019/03/26/201903260023/kampanye-di-denpasar-ini-pesan-prabowo-untuk-semeton-bali>

15. <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/03/26/127676/woowwkampanye-di-bali-capres-prabowo-janji-turunkan-semua-harga>

16. <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/04/11/131108/1000-penari-siap-warnai-kampanye-akbar-jokowi-maruf-amin>

17. <http://www.balipost.com/news/2019/03/21/71195/Ganti,Gaya-Kampanye-Model-Kolonial.html>

18. <https://www.google.com/amp/s/bali.tribunnews.com/amp/2019/03/24/bawa-badut-ke-kampanye-terbuka-pks-ingin-politik-bergembira>

19. <https://bali.tribunnews.com/2019/02/18/soal-dugaan-pelanggaran-kampanye-koster-begini-respon-bawaslu-bali>

20. <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/03/13/124715/final-kampanye-di-acara-polda-bali-kasus-koster-masuk-penyelidikan>

21. <https://bali.tribunnews.com/2019/03/24/bagi-bagi-bakso-dan-es-cincau-kampanye-kreatif-ala-made-mangku-pastika>

22. <https://www.nusabali.com/index.php/berita/43314/kpu-bali-warning-iklan-kampanye-berkonten-sara>

23. <https://www.news.beritabali.com/read/2019/03/21/201903220002/bawaslu-tabanan-kewalahan-tertibkan-atribut-partai-di-pohon-perindang>



ditemukan berita dengan isu lokal. Ada pun isu lokal yang muncul adalah mengenai kampanye calon DPD yakni Made Mangku Pastika, dan Profil salah satu caleg *incumbent* dari Golkar untuk di DPRD Bali, yakni Made Gunawan. Di luar itu dari 50 sampel berita dengan *viewers* terbesar terlihat bahwa baik penekanan media dan minat membaca pada isu nasional. Hal ini menunjukkan hilangnya isu lokal dalam agenda-agenda media lokal pada saat pemilu serentak 2019. Hilangnya isu lokal ini akan dibahas pada sub bab berikut.

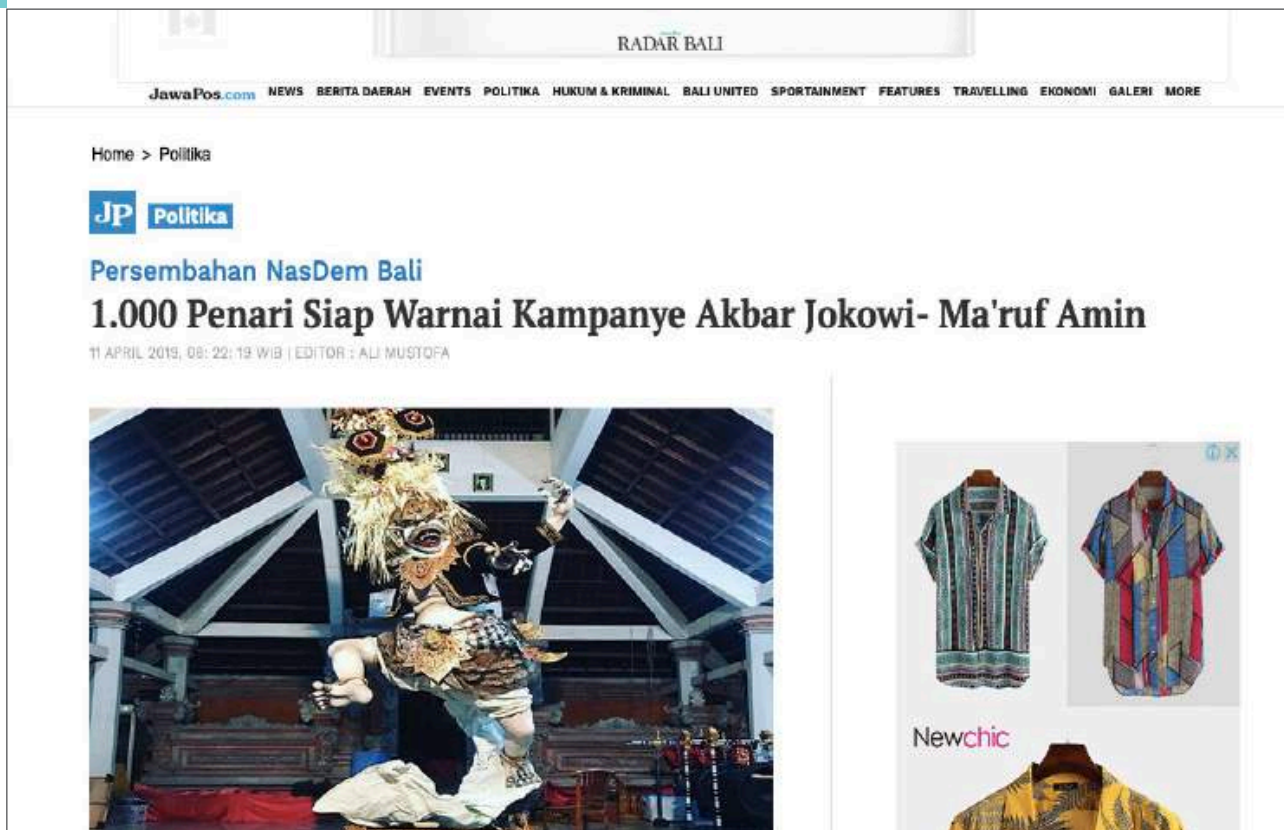
PERS DAN HILANGNYA ISU LOKAL

Pers memiliki peran untuk membangun agenda media di masyarakat. Tidak hanya agenda publik, namun juga agenda kebijakan. Hal ini dikenal dengan Teori *Agenda Setting*, Teori ini berbicara mengenai ide bahwa media memberi kontribusi

pada persepsi khalayak, nilai dan prioritas khalayak. Rogers dan Dearing (1988) mengemukakan agenda ketiga selain agenda media dan agenda publik yakni agenda kebijakan. Rogers dan Dearing menawarkan istilah penciptaan agenda atau *agenda building* sebagai istilah yang lebih tepat untuk proses kolektif dan resiprokal dari ketiga agenda yang muncul. *Agenda-setting theory* juga menilai hingga bukan hanya apa yang dipikirkan, namun apa yang dinilai, bagaimana sikap dan penilaian kita terhadap sesuatu isu²⁴.

Namun Syahputra (2013) memandang bahwa pers pada masa ini dipandang telah semakin menjauh dari agenda publik karena adanya tekanan dari para pemilik media yang kuat dan memiliki target pencapaian ekonomi dan politik tertentu. Hal ini berbeda dibandingkan pada masa orde baru. Pada masa itu pers tertekan oleh sikap represif negara sehingga melahirkan kreativitas di

24..Rogers, E.M., Dearing, J.W. (1988). Agenda-setting research: Where has it been, where it is going? . Communication Yearbook, 11



kalangan jurnalis dalam penghalusan bahasa. Publik pada masa ini diharapkan mampu untuk menangkap realitas faktual yang dikemas media dengan dua tahap pemaknaan yakni makna tekstual dan makna faktual. Syahputra (2013) menuliskan pada rezim pasca Orba sekarang ini sebagai rezim media, pada rezim ini kalimat yang digunakan bukan dalam bentuk penghalusan bahasa, melainkan kalimat yang berlebihan (hiperbolis). Hal ini dikarenakan adanya tekanan dari persaingan sesama industri media. Hal ini menurutnya lebih membahayakan dibandingkan pada rezim Orde Baru. Media pun dipandang telah banyak kehilangan idealismenya dan berorientasi pada keuntungan ekonomi-politik. Padahal keterkaitan media dengan publiknya tidak hanya urusan layaknya produsen dan konsumen.

Jurnalisme dan pers merupakan sektor terdepan dalam kerja media yang paling diharapkan

mampu memberi kontribusi pada terwujudnya agenda publik sebagai *public interest*. Syahputra (2013) menjelaskan persyaratan agar kepentingan publik tetap terpenuhi oleh media massa, yakni pluralitas kepemilikan modal, kebebasan publikasi, diversitas informasi tersedia bagi publik, diversitas ekspresi opini, jangkauan ekstensif, kualitas informasi, respons terhadap hak asasi manusia.

Pada pemilu serentak 2019, porsi pemberitaan di Bali lebih fokus pada pemberitaan dengan isu nasional yakni Pilpres dibandingkan isu atau agenda lokal. Hilangnya isu lokal pada pada media-media besar di tingkat lokal akan membuat hilangnya agenda yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di tempat tersebut. McCombs (1997) menyatakan media memiliki kekuatan memberitahukan khalayak isu apa yang perlu dipikirkan²⁵. Porsi pemberitaan yang pada saat pemilu

25 McCombs, M.E. (1997) New Frontiers in agenda setting: Agendas of attributes and frames. Mass Communication Review



serentak dengan hanya memfokuskan pada Pilpres akan menghilangkan agenda-agenda lokal seperti pemilihan legislatif di tingkat kota/kabupaten. Isu-isu lokal pun tidak menjadi bagian yang kemudian diperbincangkan di masyarakat. Pada titik ini, media melakukan tugasnya dalam menyebarkan informasi secara parsial. Kepada khalayak hanya disuguhkan isu yang menarik secara nasional, bukan agenda/isu lokal.

Susanto (2013) menjelaskan demokratisasi dalam komunikasi, merupakan titik tolak media massa dalam mendorong tercapainya masyarakat informasi yang sejahtera. Namun persoalannya, tidak mudah membangun demokrasi yang ideal²⁶. Fenomena yang terjadi di Bali, yakni hilangnya agenda lokal tidak akan mendukung tercapainya masyarakat informasi yang sejahtera. Masyarakat

menjadi tidak mengenali isu atau permasalahan lokal yang sepatutnya diperjuangkan oleh para calon legislatif.

PERS LOKAL DAN HILANGNYA KRITISISME

Salah satu fungsi pers adalah *surveillance* atau pengawasan. Pers lokal diharapkan menjalankan fungsinya sebagai pengawasan atau 'anjing penjaga'. Pers bertugas untuk memastikan pemerintahan dan sistemnya berjalan sebagaimana mestinya dan tidak merugikan masyarakat (Schechter, 2007²⁷, Ishwara 2008)²⁸.

Franklin (2006) dalam bukunya *Local Journalism Local Media, Making The Local News* menjelaskan dalam kesimpulannya, koran lokal secara bisnis

26. Eko Harry Susanto, Media Massa, Pemerintah dan Pemilik Modal, jurnal Aspikom vol 1 no 6 tahun 2013 pp 477-484 <http://www.jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/view/53/52>
 27. Danny Schechter. 2007. Matinya Media Perjuangan, Menyelamatkan Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
 28. Luwi Ishwara. 2008. Catatan-catatan Jurnalisme Dasar. Jakarta: Kompas



sangat sukses, namun kontribusi sebagai jurnalisme lokal yang kritis terhadap komunikasi politik lokal dan demokrasi lokal sangat minim²⁹. Walau dalam bukunya yang merupakan kumpulan kontribusi berbagai kalangan – akademisi, lokal jurnalis, petugas pers pemerintahan, spesialis PR dan pers regulator – mengangkat penelitian dan kajiannya di Inggris, Wales, Scotland, dan Notherland Ireland, namun apa yang disimpulkan oleh Franklin relevan pada saat ini bahkan di Bali.

Data AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) Bali mengatakan bahwa jumlah media *online* yang berkembang di Bali semakin meningkat. Ketua AMSI Nengah Muliarta mengatakan bahwa banyak media khususnya media *online* yang hadir dan berkembang di Bali dengan basis lokal yang berorientasi keuntungan ekonomi dan belum terverifikasi oleh Dewan Pers. AMSI mencatat jumlah media ini mencapai 70 hingga 80 persen dari seluruh media *online* yang beroperasi di Bali. Media lokal pada umumnya memiliki kelebihan yakni kedekatan dengan pembaca dan narasumber-narasumber lokal yang membutuhkan media

untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Namun sayangnya media lokal yang baru berkembang dan belum terverifikasi oleh Dewan Pers³⁰ cenderung tidak berimbang dalam pemberitaannya, bahkan hanya sebagai perpanjangan tangan dari narasumber atau humas-humas pemerintah dan non pemerintah. Shirley Harrison (2016, dalam Franklin, 2006) menuliskan artikelnya *Local Government Public Relations and The Local Press*, menyatakan bahwa fungsi filtrasi media atau peran *gatekeeper* media massa pada media lokal tidak sekuat media nasional.

Media lokal pun dihadapkan pada tantangan yang lebih besar. Dengan pembacanya lebih dekat, maka media lokal harus lebih memperhatikan apa yang menjadi perhatian publik yang menjadi sasaran mereka. Jurnalis lokal juga harus berhati-hati dalam menentukan sumber karena pembaca akan lebih paham dan memiliki pengetahuan yang seimbang dengan jurnalis itu sendiri.

Agenda media lokal terbentuk dari beragam sumber dengan jurnalis dan editor sebagai *gate-*

29. Bob Franklin. 2006. *Local Journalism and Local Media, Making The Local News*. London: Routledge

30. Lihat Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Praturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers

*keeper-nya*³¹ (Gandy Jnr, 1982: 1-18). Salah satu sumber berita yakni yang disediakan oleh humas-humas pemerintahan atau *government public relation offices*. Bahkan Franklin and Van Slyke Turk (1988, dalam Franklin, 2006) mengkaji kasus di salah satu daerah di Inggris, bahwa berita dari humas menghiasi hampir 90 persen dari berita di media lokal. Penelitian Franklin dan Turk menggambarkan meningkatnya *Public Relations Officer* di tingkat lokal atau agen-agen perpanjangan pemerintah lainnya untuk berinteraksi dengan jurnalis lokal, bereksplorasi mencari kesempatan untuk menjalin hubungan di antara mereka, dan mencari cara bagaimana mereka dapat memengaruhi isu lokal yang dijadikan berita. Media lokal yang belum memenuhi standar perusahaan pers profesional ini pun sebagian besar berisi berita yang berasal dari humas atau berita tentang kegiatan pemerintah, dan tidak ada *cover both sides* dari masyarakat.

Harisson dalam Franklin (2006) juga menuliskan hubungan yang berubah dan berkembang antara media dan pemerintah lokal salah satunya dikarenakan sistem pemilihan legislatif yang berubah. Pilkada langsung salah satunya menyadarkan politisi pentingnya komunikasi dalam proses pemilihan. Anggota DPR pun menyadari betapa pentingnya mensosialisasikan kepada masyarakat apa yang mereka kerjakan atau putuskan.

Maka pada pemilu serentak 2019, kesadaran para politisi dan humas-humas pemerintah untuk menggunakan media sangat tinggi, bahkan tidak hanya untuk tampil di media namun juga untuk menyetir apa yang disampaikan oleh media kepada masyarakat. Para politisi berupaya mencari kesempatan agar dapat memengaruhi isu lokal di media lokal. Namun media lokal yang memiliki banyak pengikut atau pembaca kurang memberikan porsi bagi isu-isu lokal, sehingga para politisi banyak beralih ke media-media lokal yang lebih kecil dan

bersedia memberikan porsi pemberitaan kepada mereka. Media media yang umumnya belum terverifikasi oleh Dewan Pers tersebut acapkali menerima rilis dengan gampang, bahkan tanpa proses edit sama sekali. Sehingga tidak ada daya kritis media tersebut atas isu yang disampaikan oleh para caleg/partai dan pada akhirnya tidak mampu membawa agenda-agenda lokal ke ruang-ruang wacana dan perdebatan di masyarakat lokal.

PENUTUP

Dalam pemaparan di atas diketahui bahwa terdapat dua fenomena yang terjadi pada saat pemilu serentak 2019 dan pers lokal di Bali. Fenomena yang pertama adalah (1) hilangnya isu lokal pada media-media *online* terbesar di Bali dan (2) hilangnya kritisisme media pada sistem yang berjalan. Media lokal adalah bagian dari subsistem politik dan demokrasi di Indonesia sehingga kedua fenomena ini merupakan ancaman besar atas demokrasi dan fungsi pers pada khususnya.

Syahputra (2016) menjelaskan media memiliki dua peran dalam ranah publik, yakni sebagai jurnalis yang mengumpulkan dan menyebarkan informasi dan politikus yang menyediakan forum publik untuk berdebat sehingga memunculkan yang disebut *knowledge-brokers* di *public sphere*. Dalam konteks pers lokal dan pemilu serentak 2019, pers dan media mengumpulkan dan menyebarkan informasi namun fokusnya tersentralisasi pada isu nasional sehingga tidak memunculkan *knowledge-brokers* di tingkat lokal.

Tidak mendapatkan porsi yang cukup di media-media lokal yang mumpuni, komunikasi politik kemudian dilakukan peserta pemilu melalui media-media yang belum memenuhi standar perusahaan pers profesional di Bali. Hal ini membawa dua dampak, dampak pertama adalah tidak adanya daya kritis media tersebut atas isu yang dibawakan oleh para caleg/partai dan pada akh-

31. Gandy Jnr, O. 1982. *Beyond Agenda Setting: Information Subsidies and Public Policy*. Noorwood NJ: Ablex

irnya tidak mampu membawa agenda-agenda lokal ke ruang-ruang khalayak pembacanya. Jurnalis harus tetap berada dalam daya kritis yang mengedepankan objektivitas dan keseimbangan bukan hanya aktualitas terlebih sensasionalitas.

Untuk itu perlu dibangun pers lokal yang kuat dan objektif. Selama ini pers lokal masih terlalu menitikberatkan perhatian pada aspek teknokratis administratif dan kurang memperhatikan aspek demokratis yang melibatkan peran serta masyarakat³² (Indrakrista, 2015). Berdasarkan prinsip jurnalisme, pers memiliki kesetiaan pada kepentingan masyarakat serta kewajiban untuk menyuarakan kebenaran. Jurnalis sebagai bagian utama dari pers perlu ditingkatkan kompetensinya. Thariq (2019) mengungkapkan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan pemahaman jurnalis lokal terhadap profesinya belum menggembirakan. Jurnalis belum memanfaatkan momentum Pemilu guna meningkatkan pemahaman terhadap profesi mereka. Bahkan Thariq (2019) mencatat masih ada jurnalis yang sulit bersikap objektif karena terikat pada kelompok pendukung dan kandidat Pilpres tertentu atas dasar kesamaan ideologi³³. Oleh karena itu sebagai bagian dari demokrasi, jurnalis dan mediana sebaiknya berbenah diri untuk dapat berperan sebagai pilar keempat demokrasi. Hal ini karena pers memiliki tanggungjawab untuk peningkatan kualitas masyarakat dan bangsa melalui informasi yang disuguhkan. Terlebih lagi dalam perkembangan media sosial yang semakin menguat dan disinyalir akan mengancam keberadaan pers. Maka pers harus memperkuat dirinya, mengokohkan kakinya, memegang etikanya sendiri, karena tantangan keberadaannya tidak datang hanya dari luar namun juga dalam diri pers dan jurnalis itu sendiri. ●

32. Niti Bayu Indrakrista. 2015. Pers Mengawal Demokrasi Daerah: Analisis Pemberitaan Implementasi Dana Keistimewaan di Harian Tribun Jogja.

33. Muhammad Thariq, Ribut Priadi. 2019. Pemahaman Jurnalis Lokal dalam Peliputan Pemilu 2019 di Sumatera Utara. Jurnal Simbolika VVol 5, No. 2 (2019)

REFERENSI

- Bali.tribunnews.com. 2019. judul "Kampanye di Kompyang Sujana, Prabowo Puji Kepahlawanan Masyarakat Bali". Sumber: <https://bali.tribunnews.com/2019/03/26/kampanye-di-kompyang-sujana-prabowo-puji-kepahlawanan-masyarakat-bali> diakses pada 1 April 2020 pukul 20.13 wita
- Bali.tribunnews.com. 2019. "Berkampanye di Bali, Ini yang Dirasakan Prabowo" Sumber: <https://bali.tribunnews.com/cdn.ampproject.org/v/s/bali.tribunnews.com/amp/2019/03/26/berkampanye-di-bali-ini-yang-dirasakan-prabowo> diakses pada 2 April 2020 pukul 08.03 wita
- Bali.tribunnews.com. 2019. "Bagi-bagi Bakso dan Es Cincou, Kampanye Kreatif Ala Made Mangku Pastika". Sumber: <https://bali.tribunnews.com/2019/03/24/bagi-bagi-bakso-dan-es-cincou-kampanye-kreatif-ala-made-mangku-pastika> diakses pada tanggal 2 April 2020 pukul 20.12 wita
- Bali.tribunnews.com. 2019. "Bawa Badut ke Kampanye Terbuka, PKS Ingin Politik Bergembira" sumber: <https://www.google.com/amp/s/bali.tribunnews.com/amp/2019/03/24/bawa-badut-ke-kampanye-terbuka-pks-ingin-politik-bergembira> diakses pada tanggal 2 April 2020 pukul 20.10 wita
- Bali.tribunnews.com. 2019. "Soal Dugaan Pelanggaran Kampanye Koster, Begini Respon Bawaslu". Sumber: <https://bali.tribunnews.com/2019/02/18/soal-dugaan-pelanggaran-kampanye-koster-begini-respon-bawaslu-bali> diakses pada tanggal 3 April 2020 pukul 07.10 Wita
- BaliPost.com. 2018. "Megawati Minta Kader PDIP Menangkan Pileg dan Jokowi-Ma'ruf" sumber <http://www.balipost.com/news/2018/09/01/54395/Megawati-Minta-Kader-PDIP-Menangkan...html> diakses pada tanggal 1 April 2020 pukul 20.44 wita
- BaliPost.com. 2018. "Di Bali Prabowo Janjikan Rekrut Pejabat Anti Korupsi". Sumber: <http://www.balipost.com/news/2019/03/26/71612/Di-Bali,Prabowo-Janjikan-Rekrut...html> diakses pada tanggal 1 April 2020 pukul 21.52 wita
- BaliPost.com. 2019. "Ganti, Gaya Kampanye Model Kolonial". Sumber: <http://www.balipost.com/news/2019/03/21/71195/Ganti,Gaya-Kampanye-Model-Kolonial.html>. diakses pada tanggal 1 April 21.48 wita
- Bawaslu (Badan pengawas Pemilihan Umum). 2019. IKP 2019 Indeks Kerawanan Pemilu. Bawaslu : Jakarta
- Beritabali.com. 2019. "Kampanye di Denpasar, Ini Pesan Prabowo Untuk Semeton Bali". Sumber: <https://www.news.beritabali.com/read/2019/03/26/201903260023/kampanye-di-denpasar-ini-pesan-prabowo-untuk-semeton-bali> diakses pada tanggal 1 April 19.20 wita

- Beritabali.com. 2019. "Bawaslu Tabanan Kewalahan Tertibkan Atribut Partai di Pohon Perindang" sumber: <https://www.news.beritabali.com/read/2019/03/21/201903220002/bawaslu-tabanan-kewalahan-tertibkan-atribut-partai-di-pohon-perindang> diakses pada tanggal 3 April 2020 pukul 08.34 wita
- Franklin, Bob. 2006. *Local Journalism and Local Media, Making The Local News*. London: Routledge
- Gandy Jnr, O. 1982. *Beyond Agenda Setting: Information Subsidies and Public Policy*. Noorwood NJ: Ablex
- Indrakrista. Niti Bayu. 2015. *Pers Mengawal Demokrasi Daerah: Analisis Pemberitaan Implementasi Dana Keistimewaan di Harian Tribun Jogja. JSP Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 18, No. 3, Maret 2015
- Ishwara, Luwi. 2008. *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Kompas
- Kemenkeu.2019. 'Memilih Masa Depan Indonesia', MEDIAKEUANGAN: Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal, Vol XIV/No. 139/April 2019
- McCombs, M.E. (1997) *New Frontiers in agenda setting: Agendas of attributes and frames. Mass Communication Review*
- Merkel, Wolfgang 2004. *Embedded and Defective Democracies. Democratization*. Vol 11, No 5.
- Nusabali.com. 2019. "Prabowo hari ini, Jokowi Baru Akan Goyang Bali 6 April" sumber: <https://www.nusabali.com/berita/49366/prabowo-hari-ini-jokowi-baru-akan-goyang-bali-6-april> diakses pada tanggal 1 April 2020 pukul 20.33 wita
- Nusabali.com. 2019. "Kampanye Terbuka Jokowi Di Bali Dievaluasi". Sumber : <https://www.nusabali.com/berita/49795/kampanye-Terbuka-Jokowi-Di-Bali-Dievaluasi> diakses pada tanggal 1 April 19.00 wita
- NusaBali.com. 2019. "KPU Bali 'warning' iklan kampanye berkonten SARA". Sumber: <https://www.nusabali.com/index.php/berita/43314/kpu-bali-warning-iklan-kampanye-berkonten-sara> diakses pada tanggal 2 April 2020 pukul 20.21 wita
- Radarbali.jawapos.com. 2019. berita "Wooww... Kampanye di Bali, Capres Prabowo Janji Turunkan Semua Harga". sumber: <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/03/26/127676/woowwkampanye-di-bali-capres-prabowo-janji-turunkan-semua-harga> diakses pada tanggal 1 April 19.45 wita
- Radarbali.jawapos.com. 2019. "1.000 Penari Siap Warnai Kampanye Akbar Jokowi- Ma'ruf Amin". Sumber: <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/04/11/131108/1000-penari-siap-warnai-kampanye-akbar-jokowi-maruf-amin> diakses pada tanggal 1 April 19.46 wita
- Radarbali.jawapos.com. 2019. "Final! Kampanye di Acara Polda Bali, Kasus Koster Masuk Penyelidikan" sumber: <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/03/13/124715/final-kampanye-di-acara-polda-bali-kasus-koster-masuk-penyelidikan> diakses pada tanggal 3 April 2020 pukul 07.12 wita
- Rogers, E.M., Dearing, J.W. (1988). *Agenda-setting research: Where has it been, where it is going?* . *Communication Yearbook*, 11
- Schechter, Danny. 2007. *Matinya Media Perjuangan, Menyelamatkan Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Solihah, Ratnia. 2018. *Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* vol. 3, No. 1, 2018 73-88 DOI: 10.14710/jiip.v2i1.3234
- Susanto, Eko Harry Media Massa. 2013. *Pemerintah dan Pemilik Modal, Jurnal AspiKom* vol 1 No 6 tahun 2013
- Syahputra, Iswandi. 2013. *Rezim Media: Pergulatan Demokrasi, Jurnalisme dan Infotainment dalam Industri Televisi*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Yusuf, Iwan Awaludin. 2011. *Media Lokal dalam konstelasi komunikasi politik di Daerah. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 14, No.3 <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10930>
- Thariq, Muhammad, Ribut Priadi. 2019. *Pemahaman Jurnalis Lokal dalam Peliputan Pemilu 2019 di Sumatera Utara. Jurnal Simbolika* Vol 5, No. 2 ●

PENULIS :

*) **Dr. NI MADE RAS AMANDA GELGEL S.Sos M.Si**, pengajar di Universitas Udayana, Denpasar, Bali. Lahir di Bogor. Menghabiskan masa kecil hingga bekerja di Bogor, Depok, dan Jakarta, kini berdomisili di Guwang, Sukawati, Gianyar, Bali, menikah dan memiliki 3 anak. Ia memperoleh gelar sarjana dan magister ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia. Gelar doktorat diraih pada usia 34 tahun, di Kajian Budaya, Universitas Udayana.

Menjadi dosen adalah profesi pilihannya setelah lebih dari 7 tahun berprofesi sebagai jurnalis, mulai menjadi reporter hingga presenter di BaliTV dan AntaraTV. Selain mengajar, Amanda melakukan penelitian di bidang media antara lain bekerjasama dengan KPI, KPU Kabupaten/Kota, Dewan Pers, TVRI dan beberapa Kabupaten/Kota di Bali. Ia juga aktif dalam kegiatan pengabdian seperti literasi media dengan kampanye "bijak bermedia sosial". Ia pun tergabung dalam beragam jaringan seperti ISKI, ASPIKOM, APJIKI, JAPELIDI hingga PERHUMAS.